



Judul : RUU Kepariwisata, dijanjikan tuntas masa sidang ini
Tanggal : Sabtu, 06 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Kepariwisata

Dijanjikan Tuntas Masa Sidang Ini

SENAYAN menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata akan tuntas di Masa Sidang ini yang akan berakhir pada 2 Oktober 2025. Selanjutnya, DPR memasuki masa reses.

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyampaikan, RUU Kepariwisata sebetulnya sudah hampir rampung. Namun, sempat ditunda karena dinamika politik yang terjadi pekan lalu untuk memberi ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

"Kritik dan aspirasi masyarakat yang muncul saat demonstrasi harus ditanggapi dengan baik oleh DPR," ujarnya.

Setelah situasi tenang, kata Saleh, pembahasan untuk merampungkan RUU tersebut bakal digelar kembali dalam beberapa hari ke depan.

"Pada Rabu (3/8/2025), kami juga telah menggelar rapat dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk membahas rencana kerja dan anggaran," ucapnya.

Saleh bilang, dalam RUU yang akan segera rampung itu, ada penambahan porsi tugas sehingga membutuhkan anggaran baru. Komisi VII

DPR juga sudah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 1,89 triliun untuk Kemenpar pada Rabu (3/9/2025). Dengan tambahan ini, total anggaran Kemenpar tahun 2026 naik menjadi sebesar Rp 3,75 triliun.

Anggota Komisi VII DPR Bane Raja Manalu menambahkan, saat ini RUU Kepariwisata sudah mencapai tahap finalisasi karena pembahasan substansi perubahannya sudah selesai. Kini, tahapan pembahasan masuk ke tahap sinkronisasi melalui Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus.

"Masa reses jadwalnya di 2 Oktober. Jadi sebelum tanggal itu sudah selesai," tegasnya.

Di tahapan akhir ini, menurut Bane, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi meluruskan pasal-pasal yang masih perlu dikoreksi. Pada tahapan ini akan melibatkan ahli bahasa agar tidak ada penggunaan bahasa yang salah.

Bane menyebut, ada sejumlah substansi perubahan yang penting dalam RUU Kepariwisata. Tujuannya untuk mendongkrak sektor pariwisata di Indonesia. Di antaranya, pendidikan kepariwisataan akan diatur dalam RUU tersebut agar bisa menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap. ■ TR